

ABSTRAK

Entitas nirlaba adalah entitas yang tidak memiliki orientasi pada keuntungan, salah satu entitas nirlaba di Indonesia adalah entitas Amil Zakat. Entitas Amil Zakat adalah entitas yang mengelola dana Zakat, Infak, dan sedekah. Entitas Amil Zakat Harus memiliki pelaporan keuangan yang andal dan bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Keandalan dan Akuntabilitas ini didukung oleh ketetapan yang harus diikuti oleh entitas Amil Zakat yaitu ketetapan PSAK 101 dan PSAK 109 yang mengatur penyajian, pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan. Dana yang diterima oleh entitas Amil Zakat boleh diambil sekian persen untuk oprasional dari entitas tersebut yaitu dana Amil. Penyajian dan Pencatatan Dana Amil diatur pada kedua ketetapan tersebut dan harus sesuai dengan kedua ketetapan tersebut, mengingat hak Amil juga berasal dari dana umat berupa Zakat, infak/sedekah yang dikumpulkan dan disisihkan beberapa persen yang dialokasikan untuk entitas tersebut. Penelitian ini dilakukan pada badan Amil Zakat XYZ kota Surabaya yang baru saja mengalami masa transisi setelah dibekukan pada 2018 dan dibuka Kembali pada 2021. Masa transisi ini segala bentuk administrasi dan kepengurusan mengalami perubahan yang cukup signifikan dan mempengaruhi sektor administrasinya, ketambahan Ketetapan PSAK 101 dan PSAK 109 di terbitkan pada tahun yang sama setelah masa pembekuan Badan Amil Zakat XYZ. Penelitian ini menggambarkan tentang penerapan, analisis kesesuaian pengakuan, pengukuran dan penyajian dana amil berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi keuangan 101 penyajian entitas syariah dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 pada Badan Amil Zakat XYZ Surabaya.

Kata Kunci : Entitas nirlaba, Amil Zakat, PSAK 101, PSAK 109, Dana Amil

ABSTRACT

Non-profit entities are entities that do not have an orientation towards profit, and one such non-profit entity in Indonesia is Amil Zakat. Amil Zakat is an entity that manages Zakat, Infak, and sedekah funds. Amil Zakat must have reliable financial reporting and be accountable for its financial statements. The reliability and accountability of these financial statements are supported by regulations that Amil Zakat must follow, specifically PSAK 101 and PSAK 109, which govern the presentation, measurement, recognition, and disclosure of financial statements. The funds received by Amil Zakat can be used for a certain percentage for operational purposes, which is the Amil fund. The presentation and recording of the Amil fund are regulated by both of these standards and must comply with them, considering that the rights of Amil also originate from the funds of the community, which are Zakat, Infak/Sedekah, collected and allocated to the entity. This research was conducted on Badan Amil Zakat XYZ in Surabaya, which recently underwent a transitional period after being frozen in 2018 and reopened in 2021. During this transitional period, all administrative and management forms underwent significant changes and affected the administrative sector. The issuance of PSAK 101 and PSAK 109 coincided with the end of the freeze period for Badan Amil Zakat XYZ. This research describes the application, analysis of the consistency of recognition, measurement, and presentation of the Amil fund based on PSAK 101, which presents the financial statements of Sharia entities, and PSAK 109 on Badan Amil Zakat XYZ in Surabaya

Keywords: Non-profit entities, Zakat Amil, PSAK 101, PSAK 109, Dana Amil."